Hikmah Ramadan

Redaksi menerima sumbangan naskah dari para pembaca.
Naskah dikirim ke e-mail naskahkr@gmail.com. Terima kasih

Kesalihan Sosial Puasa Ramadan

Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd

DALAM Hikmah Ramadan Jumat, 24 Maret 2023, penulis membahas "Kesalihan Ritual Puasa Ramadan", kiranya tidak lengkap jika tidak membahas "Kesalihan Sosial Puasa Ramadan". Topik ini pernah penulis sampaikan pada Ramadan tahun 2021, dalam konteks mewujudkan solidaritas pada masa pandemi.

Tulisan ini memfokuskan pada kesalihan sosial dalam dimensi keterpaduan dengan kesalihan ritual. Kesalihan ritual terkait *hablum minallah* (kewajiban kita kepada Allah SWT dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya), sedang kesalihan sosial terkait *hablum minannas* (kepedulian seseorang terhadap kepentingan sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari ibadah). Islam memandang ketakwaan seseorang tidak cukup ditandai oleh ritual yang bersifat individu seperti salat, puasa, dan haji. Namun, ketakwaan akan lebih lengkap dan komprehensif, jika dilengkapi kepentingan sosial kemasyarakatan, agar lebih bermanfaat bagi lingkungannya.

Memang tidak ada batas tegas antara kesalihan ritual dan kesalihan sosial, misalnya salat berjemaah, zakat, ataupun ibadah puasa, merangkum dimensi ritual dan sosial sekaligus, tetapi secara substansial tetap ada batas antara kesalihan ritual dan kesalihan sosial. Semestinya, hal yang terbaik adalah kesalihan yang memadukan secara sinergis antara kesalihan ritual dan kesalihan sosial, karena dalam setiap kesalihan ritual terdapat unsur kesalihan sosial, demikian pula sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa keimanan adalah fondasi dasar dalam beramal saleh, keduanya ada dan selalu beriringan. Kesalihan sosial tak terpisahkan dengan kesempurnaan iman, sebaliknya kesalehan sosial tak berarti apa-apa tanpa dibarengi dengan keimanan.

Adab berbuat baik kepada kedua orangtua, silaturahim kepada sesama, menyampaikan amanat, memelihara hak orang lain, bekerja yang baik, memberikan hak kepada orang yang harus memilikinya, kasih-sayang terhadap sesama-apalagi terhadap yang lemah, menjadi bagian dari fungsi makhluk sosial dalam kesalihan sosial. Demikian juga gerakan kepedulian sosial, gotong-royong membangun kebersamaan dengan warga, kelompok dan masyarakat sekitar terkait lingkungan dan dompet kemanusiaan juga merupakan kesalihan sosial. Dalam Islam, akan lebih bernilai ibadah jika semua itu semata-mata demi mengharapkan rida Allah SWT. Manfaat amalan ini akan dirasakan langsung oleh orang lain dan pahalanya terus mengalir meski kita sudah meninggal. .

Teristimewa momentum Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan, bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam sedunia, bulan yang memberikan rahmat, hidayah dan ampunan. Bulan di mana setiap orang mempersiapkan diri untuk berlomba-lomba meningkatkan keimanan dan meningkatkan dalam beramal saleh. Beramal saleh dalam bulan puasa berimplikasi secara sosial yang sangat jelas, yang secara sosiologis mempunyai makna sosial yang sangat tinggi, yaitu sebagai edukasi bagi setiap orang untuk merasakan beban kehidupan yang dialami orang lain yang tidak mempunyai kemapanan hidup dengan cara berderma. Dengan menahan diri dari berbagai kesenangan duniawi, seseorang akan mampu merasakan kaum dhuafa dan mampu bersimpati terhadap derita orang lain. Di masyarakat masih sering kita jumpai orang hidup dalam kelaparan dan kehausan karena tidak mempunyai kemapanan secara ekonomi. Bahkan, ada orang yang hanya makan sehari sekali, dua kali, tiga kali, dan bahkan setiap hari menahan lapar.

Ibadah puasa juga dapat mewujudkan sikap sosial dalam pengendalian diri, kedisiplinan, kejujuran, kesabaran, dan solidaritas. Puasa tidak hanya membentuk manusia yang lebih bertakwa dari segi ritual tetapi juga membentuk manusia lebih bertakwa dari segi ibadah sosial. Akhirnya, kesalihan sosial harus dipandang sebagai perwujudan peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT, yang bertujuan untuk mencapai nilai-nilai sosial melalui gerakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ukuran keberhasilan puasa Ramadan, selain meningkat kesalihan ritual, juga meningkat kesalihan sosialnya. ❑ **-d**

Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd. Kepala Lembaga Pengembangan UST, Guru Besar Pascasarjana UST dan UNY.

MAHFUD MD MINTA

Muhammadiyah Tetap Penjaga Moral Bangsa

YOGYA (KR) - Permasalahan Pemilu dan korupsi menjadi fokus bahasan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Di Tiro, Yogya, Senin (3/4).

KR-Istimewa

Menkopolhukam Mahfud MD (kiri) bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Haedar memberikan masukan mulai soal Pemilu, nilai-nilai luhur Pancasila hingga pemberantasan korupsi. Sedangkan Mahfud berharap Muhammadiyah tetap memainkan perannya sebagai salah satu penjaga moral bangsa.

Pemberantasan korupsi, tegas Haedar, harus menjadi komitmen bersama seluruh komponen bangsa, terutama seluruh pejabat negara. Lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, semuanya harus memiliki komitmen yang tinggi untuk taat pada konstitusi dan menjauhi segala praktik korupsi. Hal tersebut penting agar misi menyejahterakan negeri berjalan tanpa hambatan.

"Jika kita berhasil memberantas korupsi secara masif, secara terstruktur, dan sistematik, maka Indonesia-lah yang akan menang dan diuntungkan," ucap Ketum PP Muhammadiyah.

Kedua tokoh juga membahas seputar persiapan Pemilu 2024. Haedar memberi masukan agar Pemilu berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ia berharap seluruh komponen yang bertugas dalam pesta demokrasi ini mempersiapkan segalanya agar masyarakat dapat merasakan Pemilu yang berkeadilan dan berkeadaban, sehingga menghasilkan pejabat-pejabat negara yang dapat memajukan hajat hidup bangsa.

"Kita berharap Pemilu ini menjadi Pemilu yang berkualitas, Pemilu yang bukan hanya demokrasi yang prosedural. Bangsa ini berharap yang dilaksanakan adalah demokrasi yang substansif, yang menghasilkan DPR, DPRD, maupun Presiden, Wakil Presiden yang betul-betul berdiri di atas semua golongan. Serta mampu memajukan bangsa dan negara di atas segalanya, serta menjaga konstitusi dan moralitas bangsa kita," ucap Haedar. **(Fsy)-d**

TERKAIT KUDETA PARTAI DEMOKRAT

Moeldoko Ajukan PK Putusan MA

JAKARTA (KR) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan Kepala Staf Presiden Moeldoko telah mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kudeta Partai Demokrat. PK yang diajukan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun di MA, untuk menguji putusan kasasi MA dengan Nomor Perkara No 487 K/TUN/2022, yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022.

"KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023," kata AHY dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (3/4). Menurutnya, Moeldoko mengajukan PK dengan mengklaim telah menemukan empat Novum atau bukti baru. Namun, bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat Novum itu menurut AHY telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta, khususnya dalam perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT, yang telah diputus, tanggal 23 November 2021 lalu.

"Secara resmi, hari ini, tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kami yakin, Demokrat berada pada posisi yang benar," tegas AHY.

Sementara kuasa hukum Demokrat Hamdan Zoelva mengaku telah mempelajari semua dalil-dalil dalam memori PK yang diajukan Moeldoko. "Kami sudah mempelajari, dalam dalilnya terdapat empat novum yang diajukan. Tetapi setelah kami mempelajari dengan seksama, keempat novum itu sudah pernah diajukan dalam sidang di PTUN," katanya.

Harusnya, novum atau bukti baru yang memberikan informasi baru. Dimana jika pada sidang pengadilan pertama diajukan, maka putusannya akan berbunyi berbeda. "Kami yakin dari aspek hukum, permohonan PK ini tidak memiliki dasar dan secara hukum, harusnya ditolak," harapnya.

Terpisah, Moeldoko mengaku tidak mengurus pengajuan PK terhadap putusan kasasi yang memenangkan Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "*Ora ngerti* (tidak paham) aku urusannya," ujarnya di Gedung Krida Bakti Jakarta, Senin.

(Ant/Has)-d

Tersangka Mutilasi Tak Miliki Gangguan Psikologi

SLEMAN (KR) - Polda DIY membeberkan hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka kasus mutilasi, HP alias P (23). Warga Temanggung itu, dipastikan tidak mempunyai gangguan psikologi, sehingga proses hukum dapat dilanjutkan.

Tersangka, dengan sadar melakukan aksi sadis terhadap IA (35), asal Patehan Kraton Yogya, bahkan berpotensi untuk mengulangi perbuatannya.

"Pada diri tersangka, cukup memenuhi risiko keberbahayaan mengulangi perilakunya, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi dengan adanya kesimpulan itu, tersangka harus diproses hukum dengan pendampingan psikologi," terang Wadir Reskrimum Polda DIY AKBP Tri Panungko, di Mapolda DIY, Senin (3/4).

Tri Panungko mengatakan, hasil pemeriksaan psikolog forensik juga menyebutkan, perbuatan tersangka atas dasar motif ekonomi. "Tersangka melakukan mutilasi terhadap korban karena dorongan ekonomi yang dirangsang terus-menerus dari aktivitas rutin dengan bermain judi online," urainya.

Sementara itu, untuk melumpuhkan korban hingga IA tak bernyawa, sebelumnya tersangka melihat tayangan di YouTube. "Jadi ini adanya stimulan-stimulan terhadap tersangka dengan cara menonton YouTube dan juga adanya trigger karena terlilit utang akibat sering bermain judi online," ungkapnya.

Tri Panungko menambahkan, IA dipilih tersangka menjadi sasaran, karena karakteristik korban yang memungkinkan bagi tersangka untuk mencapai tujuannya. Mengingat, beberapa waktu sebelumnya korban sudah menawarkan diri kepada tersangka. "Secara hubungan sudah sangat dekat, sehingga pelaku terpikirkan IA menjadi korbannya," papar Tri.

Sedangkan pemilihan lokasi eksekusi, karena sebelumnya pelaku sudah mengetahui dan pernah menginap di lokasi tersebut. Apalagi jarak antara TKP dengan tempat kerjanya terbilang tak terlalu jauh. "Jadi TKP atau lokasi tersebut dipergunakan, karena pelaku atau tersangka ini sudah mengetahui kondisi TKP atau lokasi tersebut," katanya. **(Ayu)-d**

Mahasiswa 'Ambil Alih' DPRD DIY

YOGYA (KR) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DIY 'mengambil alih' Gedung DPRD DIY, Senin (3/4). Hal itu mereka lakukan setelah tuntutan untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD DIY tidak terkabul.

Begitu masuk ruang lobby, banyak dari mereka yang berdiri di atas kursi hingga meja, termasuk yang biasa digunakan pemimpin rapat. Mereka terus menyuarakan tuntutan antara lain mencabut pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, menolak penundaan Pemilu 2024, melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan gratis di DIY serta menghentikan kapitalisasi dan komersialisasi terhadap pendidikan.

Peserta aksi sempat diterima Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana. Aksi saling lempar botol air mineral tak terhindarkan. Beruntung tindakan tersebut tidak berlangsung lama. Semula aksi berjalan tertib. Sejumlah peserta aksi secara bergantian menyuarakan aspirasinya. Namun, tiba-tiba ada yang ingin menurunkan Bendera Merah Putih di Halaman Gedung DPRD DIY dan sudah sampai setengah tiang. Sejumlah aparat keamanan langsung mendekat dan menjaga tiang bendera selama aksi berlangsung.

"Kami menyambut siapa saja yang ingin menyuarakan aspirasi. Bahkan kami juga mempersilakan mereka untuk masuk ke ruang lobby, karena memang tempat untuk menerima tamu. Tapi jangan sampai menyinggung simbol negara," kata Huda.

Terkait tuntutan agar Ketua DPRD DIY Nuryadi menemui peserta aksi, Huda mengatakan, Nuryadi sedang takziyah ke rumah Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto di Semarang. **(Awh)-d**

KR-Atiek Widyastuti H

Peserta aksi menduduki Gedung DPRD DIY menuntut bertemu Ketua DPRD DIY.

SEMPURNAKAN IBADAH RAMADAN

Tunaikan Zakat, Infak dan Sedekah Lewat BRImo

JAKARTA (KR) - Bulan Ramadan menjadi momen umat Muslim di penjuru tanah air berlomba menjalankan syariat agama. Tak terkecuali mengalokasikan uangnya dalam bentuk zakat, infak dan sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan.

Dalam rangka mengakomodasi umat untuk menjalankan ibadah tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan pilihan agar tak lagi terpaku pada cara konvensional. Namun juga bisa memanfaatkan teknologi secara mudah dengan menggunakan aplikasi BRImo.

Melalui BRImo, masyarakat tak hanya dimanjakan dengan akses yang mudah sebelum proses pembayaran zakat, infak dan sedekah. Namun juga leluasa menyisihkan sebagian uangnya kapan saja, di mana saja dan berapa saja. Selain kenyamanan, masyarakat bisa merasa aman karena infak yang diberikan nantinya akan disalurkan ke lembaga pengelola dana zakat, infak dan sedekah yang terpercaya yakni, Dompet Dhuafa dan YBM BRILiaN.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto menyampaikan perseroan berkomitmen untuk selalu dapat memenuhi kebutuhan transaksi nasabah dengan praktis dan aman. Harapannya, layanan ini mampu memberikan kenyamanan bertransaksi secara daring dengan menggunakan gawai, sehingga masyarakat akan semakin mudah menjalani ibadah di bulan suci Ramadan.

KR-Istimewa

Cara bayar zakat, infak, dan sedekah melalui aplikasi BRImo.

"BRI terus berinovasi dari aspek digital dan kami berharap masyarakat dipermudah dengan dapat melakukan ibadah zakat, infaq dan sedekah dari manapun dan kapanpun," kata Andrijanto.

Bukan hanya memberikan kenyamanan dan keamanan, masyarakat juga bisa mendapatkan keuntungan setiap kali membayarkan infak di aplikasi BRImo melalui penawaran spesial "Ramadan Bawa Berkah Promo Berlimpah" yang berlangsung selama Ramadan periode 20 Maret - 30 April 2023.

Lewat promo ini, masyarakat bisa memperoleh tambahan donasi sebesar Rp5.000 untuk setiap infak yang disalurkan melalui aplikasi BRImo. Nantinya, akumulasi dari tambahan donasi akan disalurkan ke dalam program kemanusiaan Dompet Dhuafa dan Yayasan Baitul Mal (YBM) Brilian.

Berikut cara bayar zakat, infak, dan sedekah melalui aplikasi BRImo: Buka aplikasi BRImo; Pilih fitur 'Lainnya' di halaman depan aplikasi; Pilih 'Donasi'; Selanjutnya pilih produk donasi 'YBM BRILian'; Pilih jenis produk 'Zakat' atau 'Infak'; Masukan nominal; Lakukan pembayaran; Konfirmasi pembayaran lewat layanan muzakki via Whatsapp Sazki. **(Sal)**

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto